BHMN, Agenda Tersembunyi Dibalik Status Yang Tak Jelas

BHMN menyimpan banyak maksud tersembunyi di dalamnya. Ketakberdayaan pemerintah dalam menjamin pendidikan rakyat membuatnya terjebak dengan penerapan agenda-agenda neoliberal. Belum lagi masalah konsep BHMN yang dinilai masih mentah dan hasilnya pun masih disangsikan.

Tahun 1999 terjadi peristiwa bersejarah bagi UGM. UGM menjadi sebuah kampus yang otonom. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP no. 61T/1999 oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai Presiden RI waktu itu. Empat perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yaitu UGM, UI, ITB dan IPB ditetapkan sebagai kampus otonom. Tak lama kemudian, kehadiran PP No.153/2000 secara resmi menetapkan status BHMN yang pada akhirnya banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan universitas.

BHMN (Badan Hukum Milik Negara) mempunyai kemiripan dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Keduanya berhak mencari penghidupan sendiri dan memiliki keleluasaan dalam mengambil kebijakan-kebijakannya. Ada tiga bentuk BUMN, yaitu Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum) dan Persero (Perusahaan Perseroan). Kebijakan Perjan seluruhnya berasal dari negara dan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Perum diberi kelonggaran dalam hal pengambilan kebijakan. Persero sepenuhnya mengandalkan diri sendiri, sedangkan BHMN menjurus ke Persero tetapi tidak secara langsung karena masih ada kontrol dari pemerintah. Karena masih dalam tahap percobaan, ada asumsi bahwa konsep BHMN mentah, sehingga hasilnya disangsikan, seperti ditandaskan Dwi Haryati, S.H. MH, staf pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM, "Karena masih taraf percobaan, Hasilnya (pemberlakuan status BHMN -Red.) pun masih disangsikan," ungkapnya . Dia juga mengkhawatirkan pemberlakuann status BHMN ini mengarah pada swastanisasi kampus.

BHMN tidak digulirkan begitu saja. Ada alasan di balik pemberian status tersebut. "Globalisasi dan keinginan peningkatan mutu pendidikan melalui kebebasan dalam penyusunan kurikulumlah yang melatarbelakangi penentuan status UGM menjadi BHMN," jelas Sudjarwadi, Wakil Rektor Bagian Pendidikan dan Pengendalian Mutu, usai menghadiri upacara pembukaan Dies Natalis UGM. Menurutnya, konsep BHMN telah diusung beberapa tahun silam. Konsep BHMN tersirat dalam KPPJPT III (Kerangka Pengembangan Pendidikan Jangka Panjang) yang dimulai sejak tahun 1996 sampai 2005, tetapi pada pelaksanaanya terbentur oleh krisis ekonomi.

Hal ini ditanggapi oleh Drs. Revrisond Baswir, MBA, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UGM, ketika ditemui BALKON di rumahnya. Dia mengungkapkan, sebenarnya tanpa status BHMN pun universitas mampu menyusun kurikulum dan mengembangkan dirinya di bawah status otonomi kampus. Otonomi kampus bisa dilakukan tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan.

Istilah BHMN sendiri masih dalam wilayah abu-abu. BHMN baru dikenal setelah dikeluarkannya PP No.153/2000. Timbul kerancuan dalam mengartikannya, seperti yang diungkapkan Sudjarwadi yang cenderung menyalahkan pemerintah, "Sebenarnya yang diinginkan UGM dengan BHMN adalah untuk menjadi PTN yang lebih memiliki nilai plus." Menurutnya, dengan adanya BHMN, UGM mengharapkan keleluasaan untuk memberdayakan sistem aliran dana berbentuk dana block grant, yaitu dana yang sepenuhnya dapat dikelola secara mandiri oleh universitas tanpa campur tangan pemerintah. Tapi, kenyataannya masih ada campur tangan pemerintah dalam penggunaan dana tersebut dengan diberlakukanya sistem line item, yaitu pengalokasian dana pada pos-pos yang disesuaikan dengan keinginan negara.

Sudjarwadi juga menyoroti kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan pajak pada UGM dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu. Dikatakannya, ini karena ketidakmengertian pemerintah terhadap BHMN itu sendiri.

Selain Sudjarwadi, Yahya Muhaimin, Mendiknas sewaktu PP no.153/2000 dikeluarkan, menyatakan, "Tidak ada pengurangan ataupun pencabutan subsidi, tetapi negara masih wajib memperhatikan dan mengontrol perkembangan universitas." Ia, yang dosen Fisipol UGM ini, menyanggah pernyataan Sudjarwadi bahwa ide BHMN semula berasal dari
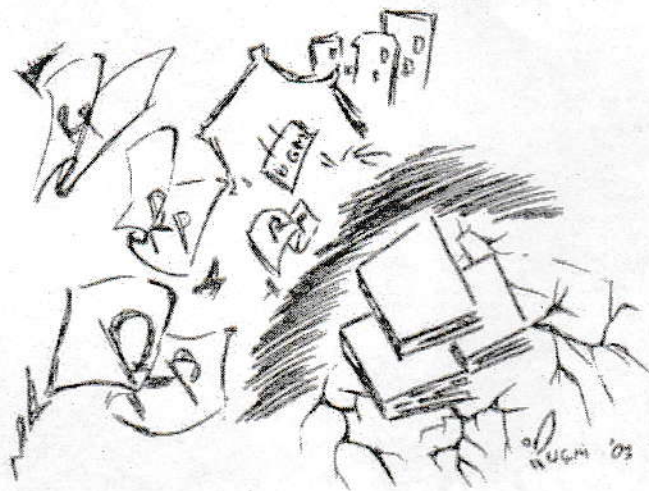
universitas itu sendiri. Dengan status BHMN, universitas dapat dengan leluasa mendayagunakan aset-aset yang dimiliki karena telah berbentuk badan hukum, tetapi masih mendapatkan subsidi. Konsekuensinya, dalam beberapa aktivitasnya dapat dikenai pajak. Karena sifatnya masih milik negara, pemerintah wajib mengawasi dan mengontrolnya.

Pernyataan tersebut dibantah Revrisond dengan nada bergurau, "Tidak betul. Persoalannya, pem-BHMN-an itu terjadi ketika Muhaimin menjabat menteri, ha...ha...ha... Buktinya banyak." Dipaparkannya, pemberlakuan status BHMN adalah bagian dari pelaksanaan agenda lepas tangan pemerintah. Pemberlakuan itu tidak berhenti hanya pada keempat universitas itu saja, tetapi akan disusul oleh seluruh universitas lainnya. "Bukan hanya universitas saja. Di Jakarta, rumah sakit sudah di-BUMN-kan, sebentar lagi di Jawa Timur. Sekarang sudah ada empat universitas yang menjadi BHMN, setelah itu, semua universitas menyusul," tambahnya.

BHMN banyak menimbulkan perdebatan. Fajar contohnya, mantan DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) KM-UGM ini mempertanyakan, "Pembentukan BHMN itu sendiri masih perlu dipertanyakan. Apakah dengan adanya otonomi ataupun BHMN berarti juga disertai dengan pengurangan atau bahkan pencabutan dana subsidi."

Fajar yang juga mahasiswa Fisipol '00 ini menambahkan, apabila memang benar anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah tidak dicabut, bahkan cenderung dinaikkan, seharusnya biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa juga tidak meningkat. Persoalannya adalah penempatan subsidi tersebut tidak transparan. Ketidaktransparanan ini kurang bisa diterima oleh mahasiswa, sehingga muncul anggapan dana-dana tersebut digunakan untuk membayar hutang. "Ini sangat ironis sekali, universitas yang berhutang, mahasiswa yang bayar," ungkapnya. Tanggapan lain dilontarkan oleh Revrisond, "Peraturan 20% itu kan datangnya dari parlemen, tetapi pemerintah tidak mau melaksanakan. Kalau pemerintah melaksanakan, mestinya tersedia cukup dana untuk tidak mengkomersialisasi universitas. Contoh lain, sudah jelas parlemen mengamanatkan bahwa anggaran tahun ini tidak boleh defisit, pemerintah tetap saja dengan sengaja menyusun anggaran defisit. Anehnya, parlemen sendiri menyetujuinya. Sikapnya tidak jelas."

Revrisond menekankan dibalik pemberlakuan status BHMN disertai pula upaya sengaja untuk mendorong universitas lebih kreatif mencari pembiayaan, agar mengurangi beban pemerintah. Entah dari jalur khusus, SPMA, dan lainnya. Dia juga menyayangkan banyak pernyataan dari pejabat, baik tingkat negara maupun universitas, yang mengatakan pendidikan baik itu mahal. Persoalannya bukan mahal tidak mahal, tapi mau dibebankan kepada siapa kemahalan tersebut?

Lepas dari kontroversi bentuk BHMN ini, Revrisond mengutarakan gagasannya bahwa seharusnya publik, termasuk mahasiswa, harus mencermati skenario yang lebih luas. Yaitu adanya tekanan untuk melaksanakan agenda-agenda neoliberal. Tidak hanya universitas. Tapi juga merambah bidang lain. Privatisasi BUMN, liberalisasi perdagangan dan pencabutan subsidi adalah contohnya. "Mahasiswa harus ingat, yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan bangsa adalah pemuda dan mahasiswa. Sekarang bagaimana mahasiswa, ingin tetap merdeka atau jatuh dalam pelukan penjajahan?" tandasnya dengan nada serius.

Adi HP, Andi F, Kari.
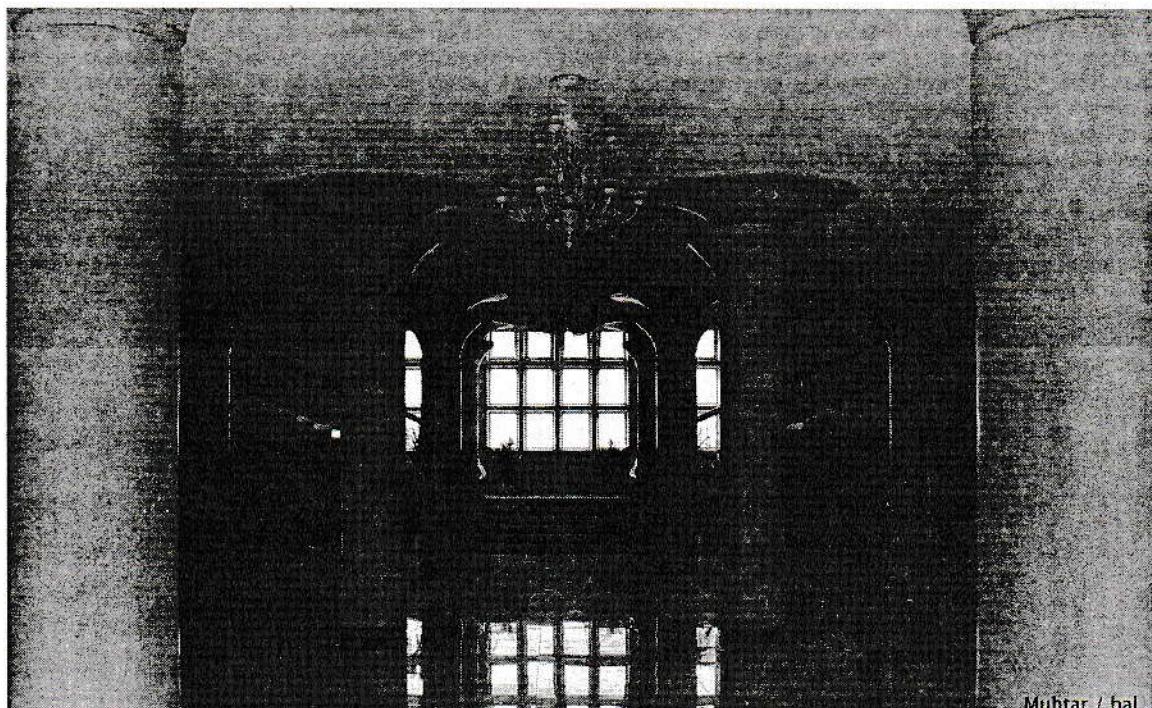
Muhtar / bal

Status BHMN, Setelah Tiga Tahun Melenggang

Ketika pertama kali mengusulkan status BHMN, UGM mengandaikan sistem blockgrant sebagai sistem pengaturan keuangan secara otonom. Tetapi sampai tiga tahun berjalan, pemerintah belum mengabulkan hal itu. Lantas, apakah tujuan pem-BHMN-an UGM hanya karena ingin mendapatkan sistem blockgrant?

Banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menginginkan kebebasan dalam pengelolaan kampus, termasuk UGM. UGM melalui rektor kemudian menyampaikan hal itu kepada Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Maka turunlah PP No.61 th.1999 mengenai PTN sebagai badan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam bab II pasal 2 bahwa Perguruan Tinggi (PT) yang berstatus BHMN bersifat nirlaba.

Prof. Dr. Yahya A.Muhaimin, mantan Mendiknas menjelaskan, "BHMN tidak bertujuan menaikkan SPP, namun agar ada status untuk mendapatkan uang." Menurutnya, status BHMN murni merupakan keinginan PT yang bersangkutan. Hal ini menjadi bukti bahwa tujuan UGM meminta status ini untuk mencari tambahan finansial. Bahkan, seperti penuturan Eddy O.S. Hiariej, SH., Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, PTN-PTN lain juga meminta status serupa karena alasan yang sama. Lebih jauh Eddy mengatakan, cost of education makin mahal. Jadi, menurutnya, wajar jika universitas menaikkan biaya pendidikan. Tak heran jika di UGM diberlakukan tambahan biaya pendidikan semisal BOP dan SPMA.

Undang Undang Dasar (UUD'45) telah menetapkan besar anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Tetapi di lain pihak, seperti diungkap Eddy, alokasi 20% dari APBN tidak didistribusikan secara maksimal. Dari 20% subsidi yang dicanangkan, baru 6% yang bisa dicairkan untuk pendidikan dan 0,04%-nya untuk perguruan tinggi.

Mengenai masalah subsidi dari pemerintah, dengan status UGM sebagai BHMN, Yahya menjelaskan bahwa pemerintah sampai saat ini tetap memberikan subsidi walaupun nantinya subsidi itu akan dicabut bila pemerintah mengganggap UGM secara finansial telah mapan. Hal tersebut dibenarkan oleh Prof. Dr. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengendalian Mutu. Tetapi mengenai jumlah nominal subsidi pemerintah yang diterima UGM, ia enggan memberi keterangan. Dan ketika BALKON berusaha menemui Goedono selaku Wakil Rektor bagian Administrasi dan Pengembangan SDM, hingga berita ini ditulis, ia belum bisa memberi keterangan dengan alasan mendahulukan kepentingan dinas.

Berdasarkan PP No.153 th.2000, mulai Januari 2001 UGM diresmikan sebagai Badan Hukum Milik Negara. Menurut Sudjarwadi,

Bersambung ke hal 16 ...
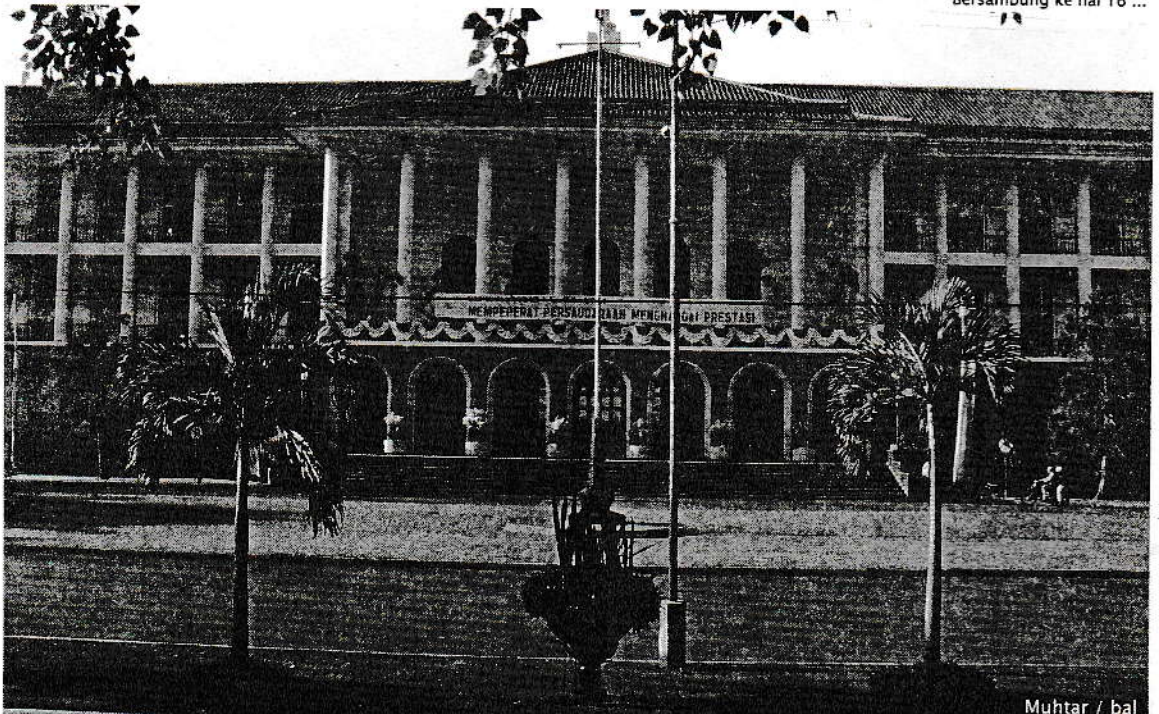
Muhtar / bal

Ketidakjelasan Perangkat Hukum BHMN

Tiga tahun UGM menyandang status BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Status itu ternyata menimbulkan dampak berantai pada peningkatan biaya kuliah, yaitu adanya penarikan SPMA(Sumbangangan Peningkatan Mutu Akademik) dan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dari mahasiswa. Namun, bagaimanakah kekuatan perangkat hukum yang melatarbelakangi perubahan status ke BHMN itu? Berikut petikan wawancara BALKON dengan Pakar Hukum Administrasi Negara yang juga pengajar pada Fakultas Hukum UGM, Dr.B. Sukismo, SH., MH.

Hera / bal

Bagaimana status BHMN dari kacamata hukum ?

Sebenarnya, secara pragmatis, BHMN itu mengarah ke swastanisasi tetapi dari kacamata hukum, eksistensi BHMN itu sah-sah saja. Namun dari segi operasional, perangkat hukum BHMN masih belum tertata. Hukum hanya mengenal aset milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan milik negara yang dipisahkan. BHMN berada di luar itu. Selain itu, status BHMN ini acuannya hanya berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah). Ini yang menjadi kurang tepat.

Letak kekurangtepatan itu dimana?

Karena kekuatan (dasar hukumRed.) BHMN bersumber bukan dari UU. Posisi BHMN itu menjadi kurang jelas, padahal UGM bukan BUMN yang kesan komersialisasinya lebih menonjol. BHMN itu sebenarnya hanya sebuah istilah untuk menyiasati agar program ini bisa eksis.

Jadi, secara yuridis adakah masalah dengan istilah BHMN?

Tidak ada.

Dibandingkan dengan tiga PTN lain yang berstatus sama, bagaimana UGM melaksanakan statusnya ini?

Masih belum ada koordinasi yang baik antarsesama BHMN ini. Masing-masing punya argumen sendiri untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Di UGM, yang menjadi masalah adalah sosialisasi yang minim dan kinerja yang kurang transparan. Mestinya, suatu perubahan hukum yang baikakan halnya perubahan status UGM ini adalah yang evolusioner, yang bertahap, bukannya revolusioner.

Apakah masih ada campur tangan dari pemerintah?

Tentu, karena modal utama kita bersumber dari pemerintah. Beda dengan perguruan tinggi swasta yang berjalan sendiri.

Bagaimana penilaian Anda terhadap perjalanan UGM sebagai BHMN?

Sejauh ini, saya masih belum dapat melihat secara jelas karena belum ada sosialisasi. Namun sebagai pengajar, saya masih merasakan hal-hal yang sama dengan sebelumnya. Mungkin hanya karena keterbatasan saya. Yang saya dengar, justrusecara fisikmahasiswalah yang mengalami perubahan.

Sebenarnya, apa perubahan utama yang dibawa oleh otonomi pendidikan?

Dana yang tadinya harus dikirim ke pusat terlebih dahulu, sekarang dikelola sendiri. Itu kunci utamanya. Tapi bukan lantas dengan adanya otonomi, universitas bisa melakukan produksi sebanyak-banyaknya dan menentukan kebijakan seluas-luasnya. Pemerintah tetap mempunyai kontribusi yang berupa kendali terhadap universitas.[]

Reza & Imung

IKA DIAN FITRIA

RENDAH HATI DENGAN SEGUDANG PRESTASI

Sederhana, itulah kesan pertama yang kita tangkap begitu melihatnya. Dengan postur tubuh yang relatif keciltinggi badan 157 cm dan berat badan 49 kgmungkin tak ada yang menyangka kalau mahasiswa tingkat dua FKU (Fakultas Kedokteran Umum) UGM yang bernama lengkap Ika Dian Fitria ini seorang atlet taekwondo.

Hera / bal

Namun keraguan itu akan terjawab jika melihat proses latihannya di Gelanggang UGM. Aksi gadis manis kelahiran Lumajang 3 Juli 1984 ini di atas matras begitu gesit dan lincah. Ditemui Balairung di kostnya pada 12 Desember 2003 lalu, penggemar musik R&B ini dengan antusias menjawab pertanyaan yang dilontarkan padanya.

Dengan logat khas Jawa Timur yang ramah, ia menceritakan bagaimana awalnya sampai ia terjun ke dunia taekwondo. "Tadinya di SMP aku ikut ekstrakulikuler tari, tapi kemudian aku tertarik untuk ikut taekwondo. Memang tadinya keluarga melarang karena aku cewek, tapi setelah pelatih mencoba meyakinkan keluargaku, akhirnya aku diizinkan mereka".

Berawal dari aktivitas semasa SMP inilah, ia mulai meniti karirnya sebagai atlet taekwondo. Berbagai prestasi telah diraihnya. Dan karena itulah, pada September 1999 ia diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya ke SMU Ragunan JakartaSMU khusus bagi atlet-atlet berbakat. Walaupun selama di Ragunan dia selalu disibukkan dengan kegiatan jadwal latihan yang padat, namun prestasi akademisnya ternyata tetap membanggakan. Hal ini dibuktikannya dengan hampir selalu meraih rangking pertama di kelasnya. Selain itu dia juga aktif berorganisasi di sekolahnya, di mana ia pernah tercatat sebagai sekretaris OSIS.

Di SMU pula, dia pernah mengalami cedera fatal pada punggung sehingga selama dua bulan tidak bisa berlatih. Karena itulah, ia hampir terancam di-drop-out dari sekolah, namun beruntung akhirnya kondisinya dapat pulih kembali.

Tidak sedikit prestasi tingkat nasional maupun internasional telah berhasil ia sabet. Salah satu yang menjadi kebanggaan merah putih adalah juara dunia yunior kelas bantam 47 kg di Irlandia pada tahun 2002. Ika sama sekali tidak menyangka akan meraih gelar juara, karena itu adalah kejuaraan internasional yang pertama baginya. Saat di final, Ika berhadapan dengan atlet dari Jerman yang postur badannya lebih besar. Namun, Ika dapat memanfaatkan keunggulan speed dan teknik yang dimilikinya. Sampai saat ini ia mencatatkan rekor sebagai satu-satunya atlet dari Indonesia yang meraih gelar tersebut.

Meski menyukai dan ingin menekuni taekwondo, namun Ika mengaku tak mungkin selamanya menyandarkan hidup sebagai atlet. Itulah sebabnya, selepas SMU ia kemudian memilih melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran; cita-citanya sejak kecil. Karena itu, setelah selesai pra-PON LG 2002, Ika membuat keputusan yang berani: tidak akan mengikuti kejuaraan tingkat Internasional lagi. Hal itu pula yang menyebabkan ia mengundurkan diri dari Pelatnas SEA-Games 2003. "Aku dihadapkan pada pilihan yang sulit antara kuliah dan taekwondo. Jika memilih untuk mengikuti kejuaraan internasional, aku akan terlalu sering meninggalkan kuliah, padahal mata kuliah di KU sangat padat". Ujar gadis berkulit sawo matang ini bijak.

Kendati pun tidak akan berlaga di kancah internasional, ia mengaku masih akan mengikuti kejuaraan tingkat daerah dan tingkat nasional. Bahkan, baru-baru ini ia kembali menorehkan prestasi dengan menyabet emas dan gelar atlet terbaik putri pada Kejuaraan Mahasiswa Nasional 2003 yang diselenggarakan Universitas Sanata Dharma di GOR Amongrogo Yogyakarta. Sekarang ini pun dia sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti PON 2004.

Di tengah semua kegemilangan prestasinya, Ika ternyata seorang pribadi yang rendah hati dan senantiasa bersyukur atas apa yang telah dicapainya, "Aku tidak bisa apa-apa, aku hanya mengandalkan Tuhan" tandasnya menutup perbincangan.

Eni/Imung/Candra

Dies Natalis 54: Mahasiswa Kurang Terlibat

54 tahun bukanlah umur yang muda bagi UGM untuk berpikir secara rasional dalam setiap bentuk kegiatan yang dilakukannya. Termasuk perayaan Dies Natalis yang dilakukan dari tahun ke tahun, sudah selayaknya mempertimbangkan kondisi internal UGM yang konon kekurangan dana operasional.

Semarak dan meriah. Itulah yang terlihat dari pembukaan Dies Natalis UGM, Jum'at (12/12) yang lalu. Serangkaian acara yang digelar dalam rangka hari ulang tahun UGM yang ke-54 ini diisi dengan acara yang padat. Namun, banyak pihak yang kemudian menyoroti acara-acara yang digelar oleh panitia Dies Natalis UGM tahun ini. Sebab, berbagai acara yang digelar oleh panitia Dies Natalis UGM tersebut, tampak sekadar hanya hura-hura semata dan tidak mencerminkan visi kerakyatan UGM. Budi Kurniawan misalnya. Menurut Menteri Departemen Kajian Strategis BEM-KM UGM ini, berbagai acara yang digelar, bertentangan dengan visi kerakyatan UGM.

Secara lebih tegas Yanuar, Wakil Koordinator Mahasiswa Peduli UGM (MP UGM), mengatakan bentuk-bentuk acara yang disuguhkan dalam rangkaian Dies Natalis ini merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap masyarakat kecil. "Ini adalah bentuk-bentuk penghinaan terhadap masyarakat kecil, termasuk masyarakat Jogja pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya," ujarnya. Ia menambahkan, bahwa UGM sudah kehilangan sensitivitasnya sebagai kampus kerakyatan. Ini terbukti dari acara-acara yang digelar, cenderung untuk kesenangan "orang-orang atas"semata.

Menanggapi hal itu ketua panitia Dies Natalis 54 UGM, Dr. Ir. Toni Atyanto Dharoko, M. Phil. menyanggahnya. "Mana yang terkesan hura-hura. Mana tunjukkan!," ungkapnya dengan nada tinggi. Toni mengatakan bahwa acara ini malah dibuat sangat sederhana. "Acara demi acara yang disusun untuk memperingati hari jadi ini kami buat dengan sesederhana mungkin," akunya. Ketika ditanya bagaimana perbandingan dengan peringatan-peringatan sebelumnya, Toni menjawab kalau peringatan sebelumnya malah terkesan lebih mewah dari acara-acara yang digelar tahun ini. "Justru tahun-tahun yang lalu malah lebih dari ini mas," katanya.

Tentang persoalan dana, Toni enggan menjelaskan tentang berapa banyak dana yang digunakan untuk penyelenggaraan acara dies natalis kali ini. "Wah saya belum bisa memberikan data berapa banyak dana yang kita gunakan untuk acara-acara ini," tukasnya. Alasannya karena beberapa seksi acara belum memberikan rincian laporan dana yang dibutuhkan. Dia mengatakan bahwa dana tersebut berasal dari anggaran tahunan, dari fakultas-fakultas, dan dari sponsor.

Minim Informasi dan Keterlibatan Mahasiswa

Dari kalangan mahasiswa, pendapat yang muncul mengenai acara Dies Natalis tahun ini sangat beragam. "Saya sebagai mahasiswa UGM nggak merasakan suasana ulang tahun itu. Tapi nggak masalah jika UGM menyelenggarakan acara-acara dalam rangka memperingati ulang tahunnya, itu kan haknya," ujar Margono, Mahasiswa HI angkatan 2000. Lain halnya dengan Ika, Mahasiswi Kedokteran angkatan 2003. Dirinya mengaku tidak begitu tahu mengenai acara-acara Dies Natalis UGM. Namun menurutnya, akan lebih baik bila dana yang dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.

Sebagian mahasiswa justru merasa tidak tahu menahu tentang Dies Natalis UGM kali ini. Karni misalnya. Mahasiwa Fakultas Psikologi ini, tidak tahu menahu tentang acara peringatan Dies Natalis. "Tidak tahu mas, kalau ada acara semacam itu," katanya seraya tersenyum lebar. Sedikitnya acara yang dapat diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum menyebabkan banyak elemen mahasiswa yang mengatakan bahwa acara peringatan ini tidak merakyat sama sekali.
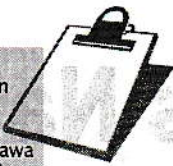
Budi Kurniawan juga membenarkan minimnya sosialisasi dan keterlibatan mahasiswa dalam peringatan kali ini. "Seakan mahasiswa hanya dijadikan objek dari rektorat," ungkap Kurniawan yang juga mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2000 ini.

Menanggapi keterlibatan mahasiswa yang minim dalam acara Dies Natalis UGM tahun ini, Toni mengakui hal itu. "Ya, karena pembentukan panitia yang mepet dan terbentur dengan puasa dan lebaran," ungkapnya beralasan. Dia juga menambahkan, "Ya peringatan kali ini hanya diikuti oleh sivitas akademika dan alumni," katanya.

Demo Sambut Dies Natalis

Merespon pelaksanaan acara Dies Natalis UGM ke-54 tahun ini,

Bersambung ke hal. 10

Berikut ini adalah ringkasan dari survai yang dilakukan oleh Jurnal BALAIRUNG untuk penerbitan edisi 37 yang akan terbit bulan Januari 2004 dengan tema "Sektor Informal dan Wajah Ekonomi Indonesia". Survai ini dilakukan dengan mengambil warung burjo sebagai objek penelitian. Warung burjo yang dipilih berada di Kecamatan Depok Sleman terutama yang berlokasi di seputaran kampus-kampus dan beberapa desa di Kabupaten Kuningan Jawa Barat yang menjadi asal pekerja burjo. Survai ini dilakukan dengan metode *in-dept reporting* (reportase mendalam) dan *in-dept interview* (wawancara mendalam). Survai ini juga diperkuat dengan data-data yang diperoleh dari pencacahan terhadap 116 warung burjo. Pencacahan ini dilakukan untuk mengetahui aspek demografis dan ekonomi dari warung burjo.

Warung Burjo: Kisah Tentang Kearifan Lokal dan Delegitimasi Pertanian

Etos wirausaha sebenarnya dipunyai oleh masyarakat kita. Demikian salah satu kesimpulan yang didapat dari hasil survai yang dilakukan oleh Jurnal BALAIRUNG. Tesis mitos pribumi malasmeminjam ungkapan Syeid Hussein Alatas lebih disebabkan karena adanya ketimpangan struktur ekonomi akibat dari kebijakan yang tidak adil dalam mengelola potensi ekonomi rakyat.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut salah satunya adalah munculnya dualisme sektor formal-informal dalam struktur ekonomi masyarakat kita. Bila melongok dualisme yang terjadi di paruh pertama abad lalu, penyebabnya ialah struktur ekonomi kolonialis yang menindas masyarakat pribumi.

Jika pola itu dipakai untuk melihat kondisi sekarang tentu kita bisa menunjuk bahwa ketimpangan itu disebabkan oleh kebijakan makro ekonomi yang lebih menitikberatkan pada laju pertumbuhan dan investasi padat modal.

Warung burjo sebagai salah satu bentuk sektor informal ternyata menyimpan banyak keunikan didalam pengelolaan usahanya. Usaha ini dijalankan dengan sistem pembagian shift dan pola tukar jam kerja dan pergantian. Sebagai bisnis yang kebanyakan dikelola oleh orang-orang Kuningan Jawa Barat, bisnis ini tak bisa dilepaskan dengan perkembangan daerah Kuningan dalam bidang ekonomi dan potensi sumber daya alamnya terutama sektor pertanian.

Dan dengan ciri khasnya tersebut, bisnis ini mampu bertahan di saat krisis yang masih mendera Indonesia saat ini dan bahkan semakin merebak. Selain itu, bisnis burjo ini juga mampu membantah tesis yang selama ini diamini sebagian para pakar bahwa masyarakat negeri ini tak memiliki etos kerja dan semangat wirausaha. Lain dari itu, warung burjo dengan segala ciri ketradisionalannya, ternyata mampu menunjukkan watak kapitalis dan korporatifnya sebagai salah satu indikator kesuksesan.

Bagaimana kisahnya hingga orang-orang Sunda bisa menyesaki Yogya dengan gerai-gerai burjonya? Hal itu bisa ditelusurusi dari cerita Pak Iyah saat pertama kali membuka warung burjo di kota budaya ini. Di kota ini, mulanya, Pak Iyah pernah bekerja sama dengan Ahmad Soja, orang yang kelak menjadi terkenal di antara sesama pedagang burjo. Selanjutnya, Ahmad Soja berhasil mendirikan warung burjo sendiri dengan nama Murni, di Jalan Kaliurang. Dalam perkembangannya, bisnis Murni melaju cepat. Layaknya perusahaan korporasi, kini tak kurang dari dua puluh gerai Murni tersebar di seantero Yogya.

Tentu saja, Murni berbeda dengan bisnis-bisnis korporasi formal yang telah menggurita, semisal KFC dan McDonald. Untuk membuka Murni-Murni yang baru, tak perlu ada lisensi dari si empunya Murni. Cukup dengan adanya hubungan kekerabatan, Murni baru bisa lahir. Dalam hal ini, saudara atau teman dekat Ahmad Soja, misalnya, kapan saja bisa membuka gerai burjo baru dengan nama Murni. Tentu saja, asal memiliki modal.

Murni bukan satu-satunya "korporasi" warung burjo di Yogya. Pun ada nama-nama lain, semisal Kabita, Raja Rasa, Panghegar, dan Sumber Vitamin. Biasanya, kelompok-kelompok burjo yang berbeda itu menandakan perbedaan asal mereka juga. Murni, misalnya, adalah pedagang-pedagang burjo yang berasal dari Desa Kertayasa. Sedangkan Kabita, untuk menyebut contoh lainnya, berasal dari Desa Mekar Mukti. Kebetulan kedua desa itu masih dalam satu wilayah Kecamatan Garawangi, Kuningan.

Perihal warung burjo ini juga tak

bisa dilepaskan dari soal tenaga kerja urban bila kita ingin mengkaji perihal seluk-beluk bisnis bubur kacang hijau ini. Dan itu mau tidak mau berkait soal pertanian di desa. Diskursus tentang proses alih kerja dari bertani ke sektor jasa ataupun industri, nampaknya sah untuk menjelaskan fenomena berbondongnya orang Kuningan bekerja di bisnis burjo. Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya, luas lahan pertanian di Kuningan bisa dibilang relatif sempit.

Kecilnya rata-rata kepemilikan lahan kian menjadikan urbanisasi sebagai satu pilihan menarik. Sebuah paradoks, memang. Desa tak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni, justru karena keberhasilan pembangunan itu sendiri. Deraan modernisasi telah melucuti legitimasi sektor agraris sebagi pusat kekuasaan. Menurut Dr. Irwan Abdullah, peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, proses delegitimasi tersebut telah mengakibatkan masyarakat desa seolah didorong untuk mendekati pusat modernitas. "Dan itu direpresentasikan oleh kota," ujar dosen Antropologi ini ketika dimintai pendapatnya perihal fenomena pekerja warung burjo.

Melunturnya nilai kekuasaan agraris itu, lanjut dosen Antropologi UGM ini, juga dipicu oleh arus modernisasi yang lebih berpusat di kota. Akibatnya, orang desa bermimpi untuk menjadi orang kota. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, mereka memanfaatkan relasi mereka yang berada di kota. "Pada situasi semacam itu, kegiatan-kegiatan ekonomi sektor informal menjadi jalan yang memberi fasilitas bagi impian-impian orang desa. Mereka difasilitasi oleh adanya jaringan penjual burjo, pedagang kaki lima, dan sebagainya," jelas Irwan panjang-lebar. Pengakuan berikut kiranya bisa memperjelas argumen Irwan, "Kalau jadi buruh tani mah harus nyangkul, panas, dan kotor. Sedangkan di sini, di burjo, walaupun hanya karyawan baru, gajinya sudah 200 ribu," demikian pengakuan Budi Elon, pemilik warung burjo Raja Rasa 10 dan Sukamampir ini.

Bak gayung bersambut, keadaan ini ditimpali oleh meruyaknya cerita sukses para perintis usaha burjo. Proses imitasi pun terjadi. Banyak orang kemudian lebih memilih mengaduk rebusan kacang hijau dibanding mencangkul tanah di sawah. "Alternatif yang paling baik di tengah situasi yang kompetitif biasanya ya dengan meniru mereka yang sudah berhasil," jelas Dr. Tadjudin Noer Effendi. Lebih jauh, dosen Sosiologi UGM ini menyebutkan bahwa angka kepastian hasil di sektor pertanian saat ini memang sangat minim, bahkan minus. Dalam kondisi seperti ini, amatlah rasional bila penduduk desa coba mencari peruntungan lain sebagai bentuk adaptasi. Alternatif itu adalah keluar dari desa, tambah Tadjudin.

Meski demikian, perkembangan usaha burjo tak serta merta mematikan sektor pertanian. Adanya rolling kerja masih menyisakan celah-celah waktu untuk menggarap sawah. Apalagi, menurut pengakuan sebagian besar pekerja burjo, pada dasarnya mereka tetap memandang penting pertanian. Hingga tak heran jika banyak dari mereka yang membayangkan untuk kembali bertani, meski umumnya baru dilakukan saat mereka tua dan tak lagi kerja di burjo. "Kalau sekarang memang lebih menarik kerja di burjo," aku Rahman, pemilik Saung Idaman. Di antara para pengusaha burjo yang juga mempunyai lahan pertanian adalah Nahrowi Ghojali, salah satu pemilik Sami Asih. Ia dan keluarganya memiliki lahan pertanian yang terhitung cukup.

Hanya saja, jika ditelusuri, memang tak banyak pekerja atau pemilik burjo yang seperti Nahrowi dan keluarganya. Tak heran jika keadaan Desa Kertayasa, salah satu produsen burjo terpenting di Kuningan, kian tak mencerminkan sebuah desa agraris, meski sawah masih membentang luas di sana.

Ciri agraris yang perlahan memudar jelas dilihat, misalnya, dari lifestyle masyarakat Desa Kertayasa, tempat migran penjual burjo kebanyakan berasal. Walau sekitar 80% dari wilayah desa seluas 106 hektar ini didominasi oleh lahan pertanian, namun kondisi permukiman di sana menunjukkan bahwa daerah tersebut telah begitu bercorak kota. Lebih banyak bermunculan bangunan perumahan baru yang terbuat dari beton, dengan arsitektur ala rumah-rumah kaum menengah perkotaan. Ini sekaligus mencirikan bahwa mereka telah relatif sejahtera secara ekonomi.[]

Sambungan dari hal 7...

beberapa elemen mahasiswa di UGM sepakat akan mengadakan aksi pada tanggal 19 Desember 2003, yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun UGM. Hal ini dibenarkan oleh Budi Kurniawan mewakili lembaganya, BEM-KM UGM. Menurutnya, pihaknya telah mempersiapkan aksi tersebut dan akan mengajak elemen-elemen mahasiswa yang lain. "Kami merencanakan untuk menggelar demo tepat pada hari jadi UGM," ungkap Budi Kurniawan.

Hal yang sama juga akan dilakukan oleh MP UGM. Bahkan isu yang akan diangkat tidak hanya seputar acara-acara yang digelar untuk memperingati Dies Natalis. MP juga akan mengangkat isu tentang visi kerakyatan UGM yang mulai luntur. "Ya, kami akan mempertanyakan kembali tentang visi kerakyatan UGM. Dan tentu itu akan kami tujukan kepada pihak rektorat," jelas Yanuar. Masih menurut Yanuar, aksi ini tidak hanya diikuti oleh anggota MP saja, tetapi juga oleh elemen-elemen pergerakan mahasiswa lainnya seperti PMII, HMI, dan FMN.

Dies Natalis 54 UGM yang mengambil tema 'Mengeratkan Persaudaraan dan Menghargai Prestasi' ini, menurut Toni, yang juga Asisten Wakil Rektor Bidang Operasional Pendidikan dan Pengendalian Mutu, dimaksudkan sebagai salah satu upaya konsolidasi segenap warga UGM untuk menyukseskan visi dan misi UGM sebagai Research University, sekaligus memperjelas posisi UGM sebagai BHMN.

Ryan, Angga, Arief, Erina, Kari, Nurdin.

Muhtar / bal

Masjid Kampus UGM: Bergerak Menuju Perubahan

Ketidaktahuan bisa melahirkan prasangka. Inilah yang terjadi ketika orang memandang keberadaan Masjid Kampus UGM dengan segenap persoalan yang melingkupinya. Proses penataan manajemen yang sedang dilakukan di sini hanya dipahami secara parsial oleh awam, akibatnya komentar miring berseliweran.

Hal ini terbaca pada laporan BALKON edisi 57 tanggal 12 November 2003. Dalam tulisan itu, ada beberapa poin masalah yang diterjemahkan secara berlebihan. Untuk itu, Jamaah Shalahuddin (JS) sebagai pihak yang terlibat langsung dalam dinamika Masjid Kampus UGM merasa perlu mengklarifikasi beberapa hal.

Tidak bisa dipungkiri, berita yang tertulis di BALKON merupakan kutipan wawancara beberapa orang yang memberi tanggapan terhadap permasalahan internal Masjid Kampus UGM. Artinya, komentar tersebut bersifat sangat personal dan tidak mewakili opini keseluruhan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di lingkungan masjid kampus.

Yang sebenarnya terjadi .....

Berita mengenai rebutan rejeki antara JS dengan pihak Takmir masjid menyangkut masalah kotak infak adalah keliru. Bermula ketika sekretariat JS pindah ke masjid kampus, sebenarnya kasus ini telah lama usai. Persoalan ini telah mencapai titik temu 4 tahun silam. Kala itu diputuskan, kotak infak menjadi milik Takmir Masjid Kampus UGM. Namun, juga disepakati bahwa JS boleh menyediakan kotak infak sendiri yang sifatnya insidental.

Ketika ada orang mengatakan bahwa "konflik" antara Takmir masjid dengan JS kian meruncing menjelang Ramadhan, pada beberapa titik hal itu benar. Namun jangan diartikan secara hiperbolik. Masalahnya hanya pada perizinan tempat untuk sekretariat. Di samping itu, ada permasalahan lain: kegiatan yang diselenggarakan Takmir masjid dulunya merupakan agenda rutin JS. Untungnya, sebelum Ramadhan tiba, problem ini dapat diselesaikan lewat musyawarah yang dihadiri pihak rektorat.

Pada buka puasa bersama antara rektorat, Yayasan Masjid Kampus dan Takmir masjid yang bertempat di rumah dinas Rektor, disepakati adanya perombakan pengurus. Tujuannya, jelas untuk membenahi sistem manajemen masjid kampus. Perombakan ini juga berhubungan dengan SK Rekorat tentang Yayasan Masjid Kampus pada masa kepemimpinan Ichlasul Amal yang hampir habis masa berlakunya. Dalam SK tersebut terdapat usulan mengenai pergantian struktur pengurus. Misalnya, pembina JS dimasukkan dalam jajaran pengurus Yayasan Masjid Kampus. Juga ada ketentuan mengenai pergantian sekretaris Yayasan Masjid Kampus. Posisi yang tadinya dipegang oleh Sauqat Ali, kini digantikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof Dr Ir Zaenal Bachruddin, Msc.

Ada beberapa tugas yang harus segera diselesaikan berkenaan dengan restrukturisasi pengurus Masjid Kampus UGM, sebagai misal:

1. Perombakan struktur Yayasan Masjid Kampus UGM.
2. Perlunya susunan kedudukan yang jelas mengenai posisi Yayasan Masjid Kampus, Takmir masjid, dan JS. Harus ada batasan yang tegas mengenai fungsi dan peranan masing-masing pihak dalam menggerakkan fungsi masjid sesuai visi-misi Masjid Kampus UGM.

Perlu digarisbawahi, persoalan yang terjadi di masjid kampus bukanlah konflik yang akan merugikan jamaah masjid. Buktinya, kerjasama yang baik dapat pula terjalin antara pihak Takmir masjid dan JS dalam menggalang dana buka puasa bersama, mengurusi kegiatan Pengajian Akbar KH Zainuddin MZ, dan masalah penggunaan fasilitas masjid.

Jika diberitakan bahwa JS ingin merebut dan menguasai masjid kampus UGM, itu sama sekali tidak benar. Bahkan, JS pernah mengajukan permohonan kepada rektorat untuk kembali ke sekretariat lama di Gelanggang. Namun, rektorat masih menginginkan JS berkedudukan di masjid Kampus UGM. Apabila kelak diputuskan pemindahan lokasi sekretariat ke luar masjid kampus, JS akan menerimanya sebagai keputusan terbaik. Meski demikian, kebijakan ini sepenuhnya merupakan wewenang rektorat.

Dan Akhirnya....

JS mengharapkan penjelasan rinci mengenai keberadaan Yayasan Masjid Kampus UGM dan Takmir masjid kampus berdasar realitas di lapangan yang mengacu pada SK rektor terdahulu, sampai pada kejelasan fungsi dan batasan peranannya di Masjid Kampus. JS juga mempertanyakan kejelasan legalitas TK Masjid Kampus untuk menghindari kebijakan Yayasan dan Takmir yang mungkin akan membatasi ruang gerak JS.

Wallahu'alam bishowab

Ketua Jamaah Shalahuddin UGM
Yanuar Reza Yulias

Who want's to be philosopher

Judul : Cara Mudah Berfilsafat
Judul Asli : Zeno and the Tortoise, How to Think Like a Philosopher
Pengarang : Nicholas Fearn
Penerjemah : Yudi Santosa
Penerbit : Bentang Budaya tahun 2003
Tebal : XIV + 287 halaman

Menghibur dan cerdas, sebuah ramuan yang manis dan halus yang akan menggelitik ujung-ujung perasa dari pembaca yang paling takut pada filsafat (*Times Educational Suplement*)

Nicholas Fearn, seorang lulusan filsafat King's collage, London mencoba menyajikan filsafat dengan pemahaman yang lebih sederhana. Ini diwujudkan dalam buku pertamanya yang berjudul Zeno and the Tortoise, How to Think Like a Philosopher, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Yudi Santosa dengan judul Cara Mudah Berfilsafat, ringkas dan menghibur.

Buku ini memaparkan biografi dan alur pemikiran dari 24 filsuf berdasarkan atas pendekatan dan metode yang bersifat umum, berikut kendala apa saja yang harus dihadapi oleh mereka ketika terpaksa harus berseberangan dengan paham yang ada dimasyarakat.

Adalah Thales, filsuf Barat pertama yang lahir di Yunani sekitar tahun 636 SM di Asia Kecil. Ia adalah satu tokoh reduksionis-proses-proses yang kompleks dan berskala besar dapat dipahami dalam istilah-istilah yang lebih sederhana- yang juga merupakan satu dari Tujuh Orang Bijak-sekelompok manusia di abad ketujuh dan keenam SM yang terkenal karena kebijaksanaan mereka sebagai penguasa, pembuat undang-undang, dan hakim-. Dengan penguasaannya menggunakan ilmu astronomi, Thales berhasil membuktikan ramalannya tentang gerhana matahari yang terjadi di Yunani pada tahun 585 SM, yang kemudian memberikan inspirasi kepada dua pihak yang akan berperang pada saat itu yaitu Mede dan Lydia untuk membuat perjanjian damai.

Selain itu, Protagoras tokoh relatifisme yang dikenal sebagai filsuf yang mampu memenangkan argumennya meskipun berada dalam posisi yang salah. Salah satu doktrin Protagoras yang paling terkenal adalah "manusia ukuran segala sesuatu " yang artinya tidak ada kebenaran kecuali yang dalam sudut pandang manusia. Ia gambarkan warna putih, adalah hasil interaksi diri manusia dan sesuatu yang dia amati. Melalui konsepnya tersebut, ia menjabarkan bahwa segala hal di dunia ini merupakan 'hasil karya perasaan manusia'. Dia mencontohkan dengan pengamatan sederhana terhadap angin adalah panas atau dingin, mengenai segala substansi yang ada dalam angin itu, dan apa sifatnya, tidak pernah dijabarkan oleh manusia selain dengan kata panas atau dingin.

Pesan yang ditangkap oleh penulis dalam buku ini adalah ternyata proses berfilsafat yang dilakukan oleh para filsuf besar diawali dengan sebuah pemikiran sederhana terhadap sesuatu disekitarnya. Hal ini memberikan peluang terhadap setiap orang untuk berfilsafat. Saat kita mulai berpikir terhadap sesuatu yang ada disekitar kita, kemudian kita inten mendalaminya, sangat dimungkinkan satu teori besar terlahir dari pemikiran kita.

Secara luas, kekuatan buku ini terdapat pada kemampuannya mengemas seluruh cerita kehidupan dan hasil pemikiran para filsuf yang diangkat dengan ringkas. Selain itu, kemampuannya mengkaitkan pemikiran para filsuf dengan isu dunia yang terus berkembang akhir-akhir ini, juga merupakan nilai tambah yang patut dikedepankan dari buku ini. Akan tetapi kendala bahasa, masih menjadi hambatan terutama untuk mereka yang masih baru berkenalan dengan ilmu filsafat. Sehingga masih jauh dari harapan yang tercantum dalam judul sebagai suatu yang menghibur. Buku ini memang tidak tuntas membahas peran para pemikir ulung tersebut dan hanya memberikan poin-poin penting dan tidak menjelaskan lebih mendalam. Oleh karena itu, dibagian akhir buku terdapat daftar buku yang dianjurkan untuk dibaca supaya dapat lebih mendalami hasil pemikiran para pemikir ulung tersebut.

Wachid

Modernitas dalam Bingkai Seni Rupa

Wajah-wajah bengis potret manusia perkotaan, setia menyapa tiap pengunjung yang lewat disampingnya. Walau hanya sebatas benda mati, efek yang ditimbulkan dari patung-patung itu mengajak kita untuk memahami bahwa tuntutan modernitas telah memaksa mereka menjadi tokoh antagonis macam hidung belang, pembual, mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dsb.

Kesan inilah yang hendak disampaikan dalam Pameran Seni Rupa Indonesia Jepang. Pameran yang berlangsung di ruang pameran Langembara, Purna Budaya dari tanggal 7 sampai 13 Desember 2003 ini, menampilkan kolaborasi karya-karya seniman Indonesia dan Jepang. Sepuluh orang seniman, baik dari Indonesia maupun Jepang, turut serta dalam pameran ini. Beberapa nama seperti Abdi Setiawan, I Nyoman Masriardi, Kaoru Morikawa, Nana Miyagi turut ambil bagian dalam pameran ini.

Pameran ini mengajak kita untuk melihat berbagai kemungkinan dan aspek yang muncul sebagai akibat dari suatu hal yang tak terbantahkan dalam seni rupa, yaitu modernitas. Dalam pameran ini kita bisa melihat bagaimana modernitas yang telah masuk dalam seni rupa sebagai bentuk ethnic of individual telah melahirkan sebuah kesamaan pandangan antara seniman-seniman Indonesia dan Jepang.

Paham individualitas itu menyebabkan seniman bisa masuk dalam suatu persoalan-persoalan yang lebih personal. Memperhatikan hal-hal yang sepele namun menarik untuk divisualkan.

Penjelajahan dan intensitas terhadap medium menyebabkan seniman fasih dan dapat menemukan hal yang spesifik sebagai jalan mengungkapkan tema dalam sebuah karya. I Nyoman Masriadi dan Kaoru Marikawa memperlihatkan konvensi medium lukisan yang tetap dipegang untuk mewadahi kepentingan seniman dalam menyampaikan ide-ide personalnya. Intensitas medium lukisan memperlihatkan bagaimana artikulasi visual terbangun dengan fasih.

Karya-karya Masriadi banyak menggambarkan kehidupan masyarakat urban. Ia menggunakan idiom lukis untuk 'mengomentari' lingkungannya. Karya-karya Masriadi banyak menampilkan dimensi ilusif lukisan. Melalui cara ini, ia mendapatkan aspek ruang, jarak, dan kedalaman yang menghasilkan ekspresi yang sunyi dan tenang. Di lain pihak, Morikawa mencerminkan figur seniman yang 'egois'. Ia memperlakukan dan menyikapi medium lukisan sebagai wilayah dimana ia dapat merekam catatan-catatan personalnya.

Pameran ini hendak mengajak kita untuk merevitalisasi subyek seniman itu sendiri. Mengembalikan perbincangan seni dengan melibatkan seniman sebagai subyek, artinya bagaimana seniman sebagai salah satu pelaku dalam lembaga sosial dapat berperan kembali di tengah perubahan kondisi yang tak terelakkan dan terus menerus dalam berbagai pola penyelenggaraan event seni rupa dewasa ini.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, pameran ini telah menunjukkan pada kita bahwa tema identitas budaya (modernitas) dalam seni rupa telah mempengaruhi pandangan kita terhadap kesenian. Pameran ini, sekaligus membuka cakrawala kita mengenai seni rupa yang biasanya rumit dan kompleks, dengan sebuah pandangan baru bahwa seni rupa dapat dibuat dengan gampang dan ringkas, dan tidak hanya bermediumkan kanvas dan cat.

Dedy, Nana, Satya

Nasi Wadang, Obat Tradisional Diabetes Melitus

"Mensana in corpore sano" sebuah pepatah kuno untuk menyadarkan kita akan pentingnya tubuh yang sehat. Salah satu cara membentuk tubuh yang sehat melalui konsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun, jika berlebih malahan dapat mendatangkan penyakit.

Mengonsumsi makanan yang berlebih dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh. Diantaranya *diabetes melitus*.. Jika bicara tentang *diabetes melitus* pastilah membahas tentang glukosa karena *diabetes melitus* merupakan penyakit peningkatan kadar glukosa darah dalam batas total. Glukosa yang melebihi batas akan mendorong timbul *diabetes melitus*.

Penyakit yang lebih populer dalam masyarakat dengan nama penyakit gula ini telah mendorong banyak penelitian tentangnya. Penelitian-penelitian tersebut berusaha menemukan lebih banyak rahasia tentang penyakit ini dan cara untuk mengobatinya. Beberapa cara pengobatan dilakukan dengan menghentikan atau memperlambat progresivitas dan mengurangi akibat yang tidak diharapkan dari penyakit ini.

Selain penelitian yang telah dilakukan, tidak kurang peran serta masyarakat ataupun kalangan non medis dalam rangka mengobati penderita dari penyakit ini. Sehingga berbagai macam cara atau obat tradisional berkembang di tengah masyarakat. Nasi Wadang merupakan salah satu diantara sekian banyak obat tradisional tersebut. Nasi Wadang adalah suatu terminologi dalam bahasa Jawa untuk menyebut nasi yang mengalami penyimpanan lebih kurang sehari.

Adakah pengaruh lama penyimpanan nasi terhadap kadar glukosa? Layakkah obat tradisional tersebut? Dan apa yang terjadi pada nasi Wadang? Iwan Ariyanto, mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum UGM mencoba menjawab dalam karya tulis ilmiahnya. Karya tulis ilmiah dengan judul *"Pengaruh lama penyimpanan nasi terhadap kandungan glukosa"* disusun sebagai syarat kelulusan jenjang studi S_1nya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyimpanan nasi terhadap perubahan kadar glukosa. Subjek penelitian ini nasi dari beras jatah¯lebih sering disebut beras kupon¯, dengan asumsi jenis beras ini yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Variable dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu terdiri dari lama penyimpanan nasi (1 jam, 2 jam, 6 jam, 9 jam, 12 jam, 24 jam) sebagai variable bebas dan kadar glukosa sebagai variable tergantungnya. Nasi yang telah mengalami perlakuan penyimpanan dipecah senyawa kimianya melalui penambahan asam lemah (HCl 17 %). Kemudian ditentukan kadar glukosanya dengan mempergunakan sifat reduksi gula terhadap *benedict* (senyawa kimia untuk mengetahui kadar glukosa) yang telah dimodifikasi. Data yang diperoleh berupa absorpsi sampel kemudian dikonversi dengan membandingkan terhadap absorpsi standar dan blanko.

Dari hipotesis diperoleh perbedaan bermakna antara rerata kadar glukosa antar kelompok penyimpanan nasi. Lebih jauh letak perbedaan itu nyata sekali diantara perbandingan antar kelompok lama penyimpanan nasi 1 jam dengan 24 jam dan 3 jam dengan 24 jam. Juga diperoleh kecenderungan penurunan kadar glukosa dengan bertambahnya lama penyimpanan.

Dari hasil tersebut, praktis pemanfaatan nasi yang disimpan beberapa lama sebelum dikonsumsi¯seperti anggapan sebagian awam¯sebagai kombinasi diet terapi penderita *diabetes melitus*. Dengan ini, cara diet dengan kombinasi konsumsi nasi Wadang belum memiliki alasan cukup untuk dibantah.

Menunurut penelitian ini, selain penyembuhan *diabetes melitus* dengan obat tradisional, diet dapat juga mencegah *diabetes melitus*. Tetapi diet yang tidak memperhatikan keseimbangan kebutuhan tubuh, penggunaan bahan makanan yang tidak tepat, cara pengolahan yang salah, dan penyimpanan yang kurang sesuai diperkirakan dapat menimbulkan *diabetes melitus*.

Baihaqi

Pesta Ulang Tahun

Ulang tahun dan pesta. Dua hal yang sepertinya identik. Ketika orang bicara tentang ulang tahun, maka yang ada di otaknya adalah sebuah pesta. Sebuah perayaan meriah yang butuh biaya. Minimal makan gratis! Ini pulalah yang dialami oleh seorang teman.

Menjelang hari ulang tahunnya, teman saya ingin mengadakan sebuah pesta, lebih tepatnya acara makan-makan. Mulai dari susunan anggaran, acara, menu, hingga *dress code* harus disiapkan sebaik mungkin. Dia juga harus menentukan jumlah undangan, untuk kemudian membuat dan menyebarkannya. Semua itu dilakukannya sendiri.

Yang terjadi kemudian, teman ini malah stress memikirkan pestanya. Diayang seharusnya berbahagia (dimanjakan) di hari itumalah sibuk merancang segala hal demi pestanya itu. Apalagi, setelah segala kelelahan, Dia masih harus pasang tampang manis sebagai nona pesta yang ramah. Singkatnya, teman saya itu telah teralienasi dari pestanya sendiri.

Apa yang dialami teman saya itu memang tak bisa disamakan dengan pesta ulang tahun UGM sekarang. Tapi setidaknya pesta ulang tahun UGM yang ke-54 kali ini tidak baik-baik saja.

Ketika bicara tentang UGM, maka kita tengah membicarakan segenap warga kampus UGM. Di sana ada rektorat, dosen, mahasiswa, karyawan, dll. UGM adalah gabungan dari elemen-elemen tersebut. Jadi ketika bicara soal ulang tahun UGM, maka kita tengah membincangkan ulang tahun seluruh elemen di UGM. Dan itu tidak akan terlepas dari kondisi masyarakat di luar UGM.

Idealnya, sebuah perayaan dinikmati oleh semua warga. Sayangnya, itu tidak terjadi. Jangankan merayakan bersama masyarakat luar, di dalam UGM sendiri perayaan itu tidak dilakukan bersama. Artinya, masing-masing elemen di UGM mengadakan perayaan sesuai versinya. Jadi jangan heran jika pada tanggal 19 Desember ini, kita akan melihat kontradiksi-kontradiksi baik di dalam maupun di luar UGM.

Satu pertanyaan klasik tiba-tiba terlintas dibenak saya. Apa yang telah terjadi pada kebersamaan UGM itu? Dan ya.... lagi-lagi, yang muncul adalah jawaban klasik!

Sedang pada tataran teknis, kita juga akan melihat banyak kejanggalan. Kabarnya,UGM sangat kekurangan dana operasional. Alasan itulah yang kemudian menjadi dasar legitimasi bagi munculnya berbagai macam pungutan. Anehnya, pada saat yang bersamaan, UGM justru mengadakan perayaan (pesta) secara besar-besaran. Pesta besar yang tentu saja memerlukan biaya besar. Belum lagi menyangkut rangkaian acara yang terkesan *glamour* dan sangat mengada-ada bila melihat kondisi Indonesia. Sinyal-sinyal visi kerakyatan UGM terlihat kian melemah.

'Mengeratkan Persaudaraan dan Menghargai Prestasi'. Itulah tema pesta ulang tahun UGM kali ini. Satu tema yang rupanya membutuhkan dana besar, karena mengeratkan persaudaraan dimaknai dengan bermain golf, tennis, dan sebangsanya. 54 lilin di atas kue ulang tahun UGM, sepertinya, hanya boleh ditiup oleh segelintir orang.

Penginterupsi

DITERBITKAN OLEH BPPM UGM BALAIRUNG
Penanggungjawab: Indi **Koordinator**: Lukman **Tim Kreatif**: Idha, Abib, Annas, Indra **Editor**: Bambang, Irfan, Iput, Asep, Karin, Dia, Parahita **Redaksi**: Adi, Dinar, Andi, Izzah, Ryan, Dedy, Imung, Nana, Eni, Puji, Erina, Angga, Arief, Ardi, Nurdin **Risdok**: Wachid, Baihaqi, Nadya, Reza **Perusahaan**: Mudita, Aris, Lizwan, Vera, Agung, Dian, Arrajab, Nia, Reny, Yuyun, Alfi **Produksi**: Hera, Zulva, Husni, Satya, Betha, Muhtar, Bram, Taufan, Jay, Kempoedz
ALAMAT REDAKSI DAN SIRKULASI: BULAKSUMUR B-21 YOGYAKARTA 55281, TELEPON:(0274) 901077, FAX:(0274)566171, **E-MAIL: BALKON.UGM@EUDORAMAIL.COM,** REKENING BCA YOGYAKARTA NO.0372072120 A.N WIDHI BUDIARTATI +++
GRATIS TIAP SENIN DI: UPT I, UPT II, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA, MASJID KAMPUS, BONBIN SASTRA, GELANGGANG MAHASISWA, WARTEL KOPMA, PARKIR TP, KAFETARIA KOPMA, FASNET TEKNIK, KPTU TEKNIK, WARNET EKONOMI, PLAZA FISIPOL, KANTIN BIOLOGI, KANTIN PETERNAKAN, KANTIN FILSAFAT, FAKULTAS-FAKULTAS LAIN, DAN BULAKSUMUR B-21

Sambungan dari hal 4...

dengan status BHMN, setidaknya diyakini UGM akan memperoleh tiga keuntungan: secara akademik lebih berorientasi pada kepentingan mahasiswa, organisasi yang terdesentralisasi, dan pengelolaan anggaran keuangan yang otonom.

Tetapi menurut Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., pada Seminar Nasional BEM dan KM UGM tanggal 15 November 2003 lalu, masalah yang paling pelik adalah tentang pendanaan. Sistem Blockgrant yang dianggap paling tepat bagi BHMN tak dapat dilaksanakan karena peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodasikan sistem ini. Sependapat dengan Koesnadi, Sudjarwadi menegaskan, "Sistem blockgrant yang dicita-citakan belum dapat dilaksanakan karena undang-undang belum memfasilitasi hal ini."

Lebih jauh, menurut Soedjarwadi, dengan statusnya sebagai BHMN, seharusnya UGM dapat mengatur keuangannya secara otonom dan pemerintah hanya berperan sebagai penyubsidi. Sistem itu disebut Blockgrant. Tetapi kenyataannya, sistem keuangan yang masih berlaku sekarang adalah sistem Lineitem, yaitu sistem keuangan yang mengikutsertakan campur tangan pemerintah dalam pengalokasian dana. Sistem Lineitem ini, di lain pihak, berbeda pada saat UGM masih berstatus sebagai PTN. Kala itu, universitas harus menyetor biaya pendidikan yang berasal dari mahasiswa ke pemerintah, lalu dana tersebut dikembalikan lagi ke universitas dalam bentuk subsidi.

Eddy juga memaparkan, ada ketidaksepakatan antara Depdiknas dan Departemen Keuangan (Depkeu) mengenai sistem Blockgrant. Istilah tersebut, terkait dengan status BHMN yang tidak dikenal dalam Depkeu. Sehingga, menurut Eddy, dapat dikatakan bahwa tujuan yang dicita-citakan oleh UGM, yaitu Blockgrant, sampai saat ini belum berhasil.

Oleh karena itu, UGM melakukan usaha-usaha untuk memantapkan Legalentity (posisi hukum) untuk mendapatkan Blockgrant. "UGM mendaftarkan diri menjadi BHP (Badan Hukum PendidikanRed.) supaya legal secara hukum untuk dijadikan BLU (Badan Layanan UmumRed.), sehingga UGM bisa mendapat Blockgrant," ungkap Eddy.

Dengan usulan untuk menjadi BHP dan BLU, maka makin terang tujuan privatisasi kampus. Dengan menjadi BHP, secara otomatis UGM akan menjadi badan hukum privat yang modalnya berasal dari kekayaan pribadi (swasta). Eddy juga mengatakan, "Rencana UGM tahun depan adalah merubah sistem BOP menjadi sistem per-sks." Jadi pembayaran BOP per semester selama ini akan diganti dengan sistem pembayaran per-sks layaknya Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Dalam pelaksanaannya, selama tiga tahun ini, ternyata status PT BHMN tak membawa UGM menjadi lebih baik, malah membawa efek yang merugikan UGM. Misalnya, kata Sudjarwadi, "UGM tidak akan mudah begitu saja untuk mendapatkan subsidi proyek dari pemerintah walaupun toh selama tiga tahun ini belum ada pencabutan subsidi operasional dari pemerintah". Selain itu, menurut Soedjarwadi, jika UGM mendapat proyek dari luar negeri, maka UGM harus membayar pajak pada pemerintah.

Jika demikian, lalu mengapa UGM berani mengambil keputusan mengubah status menjadi BHMN? Secara diplomatis Eddy mengatakan, "Tanya saja rektor yang memutuskan saat itu (Ichlasul AmalRed.)!" []

Dinar, Izzah, Puji, Ardi